

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hak kekayaan intelektual atau juga dikenal dengan HKI merupakan terjemahan atas istilah *Intellectual Property Right* (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Obyek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.<sup>1</sup>

HKI sendiri dapat dibedakan menjadi:

1. Hak Cipta (*copyright*) diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Hak Kekayaan Industri (*industrial property right*), yang terdiri atas:
  - a. Paten (*patent*) diatur di dalam UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten;
  - b. Merek (*trade mark*) diatur di dalam UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
  - c. Perlindungan Varietas Tanaman diatur di dalam UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
  - d. Rahasia Dagang (*trade secret*) diatur di dalam UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
  - e. Desain Industri (*industrial design*) diatur di dalam UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; dan f. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*layout design of integrated circuit*) diatur di dalam UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

---

<sup>1</sup> .Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "Memahami HKI", Tersedia: <http://www.dgip.go.id/memahami-hki-hki> diakses tanggal 15 Juli 2017.

Dari beberapa hal tersebut, hak cipta menjadi bagian yang memiliki objek yang dilindungi paling luas. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hak kekayaan intelektual, hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak yang lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa seizin pemegangnya. Hak ini dimiliki pencipta atau pihak yang menerima hak dari pencipta. Hak eksklusif ini dilaksanakan tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan hak cipta sebagaimana diatur pada bagian kelima Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002.<sup>2</sup> Pada dasarnya ada dua macam sistem untuk memperoleh hak eksklusif, yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif. Kedua sistem tersebut sama-sama mengenal pendaftaran terhadap objek HKI tetapi tidak semua pendaftaran digunakan untuk menentukan cara memperoleh hak eksklusif.<sup>3</sup> Dengan hak eksklusif ini, pencipta dan pemegang hak cipta berhak untuk mengumumkan, memperbanyak karya ciptaan, dan memberikan izin untuk itu kepada orang lain dengan lisensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Khusus mengenai perlindungan Hak Cipta, salah satu konvensi yang mengaturnya adalah Konvensi Berne. Konvensi Berne ditandatangani di Berne pada tanggal 9 September 1886 yang mengatur tentang perlindungan karya sastra

---

<sup>2</sup> .Gatot Supramono, 2010. *Hak Cipta Dan Aspek Aspek Hukumnya*. Jakarta: PT Rineka Cipta. Hal 9

<sup>3</sup> .Ibid

dan seni.<sup>4</sup> Obyek perlindungan Hak Cipta dalam Konvensi Berne terdiri atas karya sastra, ilmu, dan seni yang meliputi segala hasil di bidang sastra, ilmu, dan seni dengan cara atau bentuk pengungkapan apa pun. Di samping karya asli Pencipta pertama, dilindungi juga karya-karya kaitan (salinan), seperti terjemahan, saduran, aransemen musik, dan karya fotografis. Perlindungan juga diberikan kepada para Pencipta atau pemegang hak. Para Pencipta memperoleh perlindungan yang sama seperti yang diperoleh mereka dinegara sendiri atau perlindungan yang diberikan oleh Konvensi Berne (*National Treatment*). Maksud dari perlindungan yang diberikan oleh Konvensi Berne (*National Treatment*) adalah Pencipta sebenarnya merupakan warga negara dari salah satu negara yang terikat pada Konvensi Berne tetapi Pencipta juga akan memperoleh perlindungan di negara-negara lain yang juga tergabung dalam Konvensi Berne tersebut.<sup>5</sup>

Indonesia bukan termasuk anggota Konvensi Berne sebelum tahun 1997 sehingga tidak tunduk pada prinsip *national treatment* tersebut. Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta mengatur pula mengenai perlindungan Hak Cipta Asing di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 48 yang menyatakan Undang-undang ini berlaku terhadap:

- a. semua ciptaan warga negara Indonesia, badan hukum yang diumumkan pertama kali di dalam negeri maupun di luar negeri;
- b. semua ciptaan orang bukan warganegara Indonesia dan badan asing yang untuk pertama kali diumumkan di Indonesia.

---

<sup>4</sup>.Abdulkadir Muhammad. 2007.*Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal 37.

<sup>5</sup>.Ibid. Hal 43

Perubahan pertama terhadap pengaturan Hak Cipta di Indonesia dilakukan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 juga mengatur ketentuan mengenai perlindungan Hak Cipta Asing yang pengaturannya terdapat dalam ketentuan Pasal 48 yang menyatakan Undang-undang ini berlaku terhadap :

- a. Semua ciptaan warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
- b. Semua ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang diumumkan untuk pertama kali di Indonesia;
- c. Semua ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia, dengan ketentuan :
  - 1) Negaranya mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan Hak Cipta dengan Negara Republik Indonesia; atau
  - 2) Negaranya dan Negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam suatu perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta.

Perubahan kedua terhadap pengaturan Hak Cipta di Indonesia dilakukan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang HakCipta sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun1987. Perubahan tersebut dilakukan berkaitan dengan penerimaan dan keikutsertaan Indonesia dalam Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Related Aspects ofIntellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs*) yang merupakan bagian dari Persetujuan Pembentukan OrganisasiPerdagangan Dunia (*Agreement Establishing*

*the World Trade Organization*). Oleh karena itu, Indonesia harus melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual termasuk Hak Cipta terhadap persetujuan internasional tersebut.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 juga mengatur ketentuan mengenai perlindungan Hak Cipta Asing yang terdapat dalam ketentuan Pasal 48 yang menyatakan Undang-undang ini berlaku terhadap semua ciptaan dan hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta:

- a. Warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
- b. Bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali diumumkan di Indonesia atau diumumkan di Indonesia dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ciptaan itu diumumkan untuk pertama kali di luar Indonesia;
- c. Bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia dan bukan badan hukum Indonesia, dengan ketentuan:
  - 1) Negaranya mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan Hak Cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta dengan Negara Republik Indonesia;
  - 2) Negaranya dan Negara Republik Indonesia merupakan pihak ataupeserta dalam suatu perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak-hak Yang Berkaitan dengan Hak Cipta.

Perubahan ketiga terhadap Undang-Undang Hak Cipta dilakukan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dalam Undang-Undang ini, Hak Cipta Asing tetap mendapatkan perlindungan

---

6.       Konsiderans Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987.

yang tercantum dalam ketentuan Pasal 76 yang menyatakan Undang-undang ini berlaku terhadap:

- a. Semua ciptaan warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
- b. Semua ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang diumumkan untuk pertama kali di Indonesia;
- c. Semua ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia, dengan ketentuan:
  - (i) Negaranya mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan Hak Cipta dengan Negara Republik Indonesia; atau
  - (ii) Negaranya dan Negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta.

Berkaitan dengan perlindungan terhadap Hak Cipta Asing, Indonesia tidak hanya mengaturnya dalam bentuk undang-undang saja tetapi juga dalam bentuk ikut serta meratifikasi Konvensi Berne yang kemudian dituangkan dalam Keppres No. 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works* pada tanggal 7 Mei 1997.<sup>7</sup> Di samping itu, Indonesia juga membuat perjanjian bilateral antar dua negara sebagai realisasi dari iktikad baik untuk melindungi Hak Cipta secara timbal balik. Perjanjian yang telah dibuat kemudian dituangkan pengesahannya dalam bentuk Keputusan Presiden, diantaranya:<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>.Suyud Margono, 2010, *Hukum Hak Cipta Indonesia Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO)-TRIPs Agreement*, Bogor. Ghalia Indonesia. Hal. 66.

<sup>8</sup> .Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2014, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung. Citra Aditya Bakti, Hal. 118.

- a. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1988 tentang Pengesahan Persetujuan mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta atas Karya Rekaman Suara antara Negara Republik Indonesia dengan Masyarakat Eropa;
- b. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1989 tentang Pengesahan Persetujuan mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak antara Negara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat;
- c. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1993 tentang Pengesahan Persetujuan mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak antara Negara Republik Indonesia dengan Australia; dan
- d. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak antara Negara Republik Indonesia dengan Inggris.

Perjanjian bilateral ini mengandung asas resiprositas (*reciprocity*). Asas resiprositas atau asas timbal balik maksudnya adalah perlindungan akan diberikan terhadap Hak Cipta atau hasil karya warga negara Masyarakat Eropa, Amerika Serikat, Australia, atau Inggris yang beredar di Indonesia dan sebaliknya juga hasil karya warga negara Indonesia yang diedarkan di Eropa, Amerika Serikat, Australia, atau Inggris akan dilindungi pula.<sup>9</sup>

Sekalipun ada pengaturan mengenai Hak Cipta Asing dalam Undang-Undang maupun dalam perjanjian bilateral, tetapi tetap saja masih terjadi pelanggaran Hak Cipta Asing di Indonesia. Salah satu contohnya adalah kasus pelanggaran Hak Cipta antara *The Institute for Motivational Living, Inc.* (Pencipta/Penggugat) dengan Yon Noviar (Tergugat).

Penggugat dalam sengketa ini mempunyai Ciptaan berupa:<sup>10</sup>

1. *Person to Person*;
2. *Personality Profile Questionnaire*;
3. *IML DISC Insight Personality System Analysis*;

---

<sup>9</sup> .Ibid

<sup>10</sup> .Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 61/Pdt.Sus/Hak Cipta/ 2013/PN Niaga Jkt. Pst.

4. *IML DISC Insight Personality System Software*, untuk semua versinya, termasuk dan tidak terbatas pada V.1.0,2.0,2.05, 2.06, 2.07, 2.09, 2.5;
5. *The Personality System*;
6. *Personality Style Report*;
7. *Understanding Your Personality Style Workbook*; dan
8. *Understanding Your Personality Style Point*; yang selanjutnya, sebagian dan/atau seluruhnya disebut sebagai “Materi Ciptaan”.

Materi Ciptaan Penggugat telah pula didaftarkan dan memperoleh sertifikat pendaftaran Hak Cipta dari Kantor Pendaftaran Hak Cipta Amerika Serikat (*United States Copyright Office*) yang dibuktikan dengan:<sup>11</sup>

1. Sertifikat Pendaftaran Hak Cipta atas barang ciptaan bernama *Person to Person* dari Kantor Pendaftaran Hak Cipta Amerika Serikat tertanggal 14 April 1997;
2. Sertifikat Pendaftaran Hak Cipta atas barang ciptaan bernama *Personality Profile Questionnaire* dari Kantor Pendaftaran Hak Cipta Amerika Serikat tertanggal 14 Agustus 2000;
3. Sertifikat Pendaftaran Hak Cipta atas barang bernama *IML DISC Insight Personality System Analysis* dari Kantor Pendaftaran Hak Cipta Amerika Serikat tertanggal 7 Februari 2001;
4. Sertifikat Pendaftaran Hak Cipta atas Materi Ciptaan bernama *IML DISC Insight™ Personality System Software* dari Kantor Pendaftaran Hak Cipta Amerika Serikat tertanggal 18 Juni 2001;
5. Sertifikat Pendaftaran Hak Cipta atas barang ciptaan bernama *The Personality System* dari Kantor Pendaftaran Hak Cipta Amerika Serikat tertanggal 14 September 2000;
6. Sertifikat pendaftaran Hak Cipta atas barang ciptaan bernama *Understanding Your Personality System Workbook* dari Kantor Pendaftaran Hak Cipta Amerika Serikat tertanggal 14 April 1997.

Penggugat juga telah mendaftarkan Materi Ciptaannya di Indonesia melalui Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intektual, yang dibuktikan dengan:<sup>12</sup>

1. Surat Pendaftaran Ciptaan tertanggal 07 Juli 2011 untuk judul ciptaan berupa *Personality Profile Questionnaire*; dan

---

<sup>11</sup> . Ibid

<sup>12</sup> . Ibid



2. Surat Pendaftaran Ciptaan tertanggal 07 Juli 2011 untuk judul ciptaan berupa *IML DISCInsight Personality System Analysis*.

Selain itu, Penggugat juga telah melakukan upaya deklaratif dengan mengumumkan Materi Ciptaan di wilayah Republik Indonesia melalui surat kabar harian kompas tertanggal 3 Desember 2009 untuk dapat diketahui khalayak ramai. Pengumuman ini pada intinya untuk menegaskan bahwa *The Institute for Motivational Living, Inc.* adalah Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta atas materi yang dilindungi oleh hukum yang berlaku di Indonesia.

Meskipun sudah ada tindakan-tindakan yang dilakukan Penggugat untuk melindungi Materi Ciptaannya di Indonesia, tetapi tetap saja terjadi pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh Yon Noviar. Yon Noviar melakukan pelanggaran Hak Cipta berupa:<sup>13</sup>

- a. Menulis dan menerbitkan buku berjudul *DISC: The Leading Behavioral Assesment Tools* (mengukur perilaku kerja) dimana di dalam buku tersebut Tergugat secara sepihak telah mencantumkan nama Penggugat di dalam Kata Pengantar buku tersebut serta mengklaim Penggugat sebagai pihak pendukung penerbitan buku tersebut tanpa izin dan atau persetujuan tertulis dari Penggugat;
- b. Menulis, menerbitkan, dan memperjualbelikan buku berjudul “*handbook of discalat ukur perilaku kerja*” pada tahun 2009 yang sebagian besar materi serta isinya merupakan duplikasi dan terjemahan dari materi ciptaan Penggugat yang kemudian diklaim sebagai ciptaan Tergugat;
- c. Mengadakan Program *Certified Behaviore Analysis* (CBA) yang membagikan buku berjudul *Certified Behavioral Analyst, Disc Workbook* dan CD Disc Tutorial yang isinya merupakan kutipan, terjemahan, dan penggunaan materi ciptaan Penggugat yang berjudul *disc training level 1: introduction to behavioral analysis (3 ring binder course)*, *understanding your personalitystyle workbook*, dan *disc training level 1: introduction to behavioral analysis (online certification course)*; dan
- d. Mengklaim, menggunakan, dan memperjualbelikan “*assessment toolkits*” (alat penilaian) baik secara online melalui website Tergugat

---

<sup>13</sup>. Ibid

(www.discoverystyles.com dan www.qqinternational.com) maupun non online melalui iklan dimedia massa, yang mana secara substansial dan khas materinya diperoleh dan diambil dari Materi Ciptaan Penggugat tanpa mencantumkan nama Penggugat sebagai Penciptanya maupun Pemegang Hak Cipta atas Materi Ciptaan tersebut dan juga tanpa persetujuan dan kompensasi dalam bentuk apapun kepada Penggugat.

Akibat adanya pelanggaran Hak Cipta tersebut, Penggugat mengajukan gugatan pelanggaran Hak Cipta terhadap Tergugat melalui surat tertanggal 10 September 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 September 2013, di bawah Register Perkara Nomor: 61/Pdt.Sus/Hak Cipta/2013/PN Niaga Jkt. Pst.<sup>14</sup>

Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan karena Amerika Serikat (sebagai tempat kedudukan badan hukum Penggugat) dan Indonesia (sebagai tempat terjadinya pelanggaran Hak Cipta) sama-sama sudah tergabung menjadi anggota Konvensi Berne sehingga berlakulah prinsip *national treatment*. Oleh karena itu, seharusnya Penggugat mendapat perlindungan berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dengan demikian, dalam hal terjadi pelanggaran Hak Cipta berlakulah ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menyatakan “Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptaannya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil Perbanyakan Ciptaan itu”.

Terhadap surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang salah satunya mengenai gugatan kabur (*obscuur*

---

<sup>14</sup>.Ibid

*libel*) dengan alasan Penggugat tidak menyebutkan secara rinci dan detail mengenai pelanggaran Hak Cipta yang telah Tergugat lakukan terkait dengan Materi Ciptaan milik Penggugat. Setelah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini membaca surat gugatan Penggugat beserta eksepsi Tergugat, Majelis Hakim membenarkan dan menerima eksepsi *obscuur libel* yang diajukan oleh Tergugat sehingga hakim melalui Putusan Nomor 61/Pdt.Sus/Hak Cipta/2013/PN Niaga Jkt.Pst. memutus dengan salah satu amar “Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)”.

Penggugat kemudian melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung untuk melawan putusan Pengadilan Niaga tersebut. Akan tetapi, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 306 K/Pdt.Sus-HKI/2014, menjatuhkan putusan dengan salah satu amar menyatakan “Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi *The Institute For Motivational Living, Inc.*, tersebut”. Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan dengan amar tersebut karena menurut pertimbangan Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 61/Pdt.Sus/Hak Cipta/2013/PN Niaga Jkt.Pst. tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang dulu adalah Penggugat harus ditolak oleh Mahkamah Agung.<sup>15</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat ke dalam penelitian yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) Dalam Sengketa Hak Cipta (Studi Kasus Putusan Nomor**

---

<sup>15</sup>. Putusan Mahkamah Agung Nomor 306 K/Pdt.Sus-HKI/2014.

**61/Pdt.Sus/Hak Cipta/2013/PN.Jkt. Pst. Jo. Putusan Nomor Mahkamah Agung Nomor 306 K/Pdt.Sus-HKI/2014)”.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini :

Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 61/Pdt.Sus/Hak Cipta/2013/PN.Jkt. Pst. Jo. Mahkamah Agung Nomor 306 K/Pdt.Sus-Hki/2014?

## **C. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini diantaranya:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 61/Pdt.Sus/Hak Cipta/2013/PN.Jkt. Pst. Jo. Mahkamah Agung Nomor 306 K/Pdt.Sus-Hki/2014.

## **D. Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis, yaitu memperkaya khazanah keilmuan, dapat dijadikan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dan untuk memperkaya literatur pengetahuan tentang gugatan *obscuur libel*.
2. Manfaat secara praktis, sebagai acuan pembaca untuk lebih memahami arti sebuah gugatan *obscuur libel* khususnya bagi masyarakat yang berperkara.

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Metode Pendekatan**

Dalam pembahasandan pemecahan masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan normatif-terapan *judicial case study* yaitu pendekatan studi kasus hukum karena konflik yang diselesaikan melalui putusan pengadilan (*yurisprudensi*). Pendekatan normatif-terapan *judicial case study* dalam penelitian ini mengkaji putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 61/Pdt.Sus/Hak.Cipta/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst dan putusan Mahkamah Agung Nomor 306 K/Pdt.Sus-Hki/2014..

- a. Bahan hukum primer terdiri dari:
  - 1) Putusan Nomor 61/Pdt.Sus/Hak.Cipta/2013/PN.Niaga Jkt.Pst
  - 2) Putusan Mahkamah Agung nomor 306 K/Pdt.Sus-HKI/2014
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku,tulisan-tulisan, penelitian studi kasus dan artikel-artikel yang diterbitkan yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan ini didapat dari kamus dan ensiklopedi, serta browsing internet yang membantu penulis untuk mendapatkan bahan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan langkah :

1. Studi pustaka, yaitu pengkajian tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta di butuhkan dalam penelitian hukum normatif.
2. Studi dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi dokumen dalam penelitian ini adalah dengan mengkaji putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 61/Pdt.Sus/Hak.Cipta/2013/PN.Niaga. Jkt.Pst dan putusan Mahkamah Agung Nomor 306 K/Pdt.Sus-Hki/2014.

### **4. Teknik Analisa Data**

Metode dalam mengolah data yang sudah terkumpul adalah :

1. Pemeriksaan data, yaitu mengoreksi data apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan apakah sudah sesuai sehingga data yang terkumpul benar-benar bermanfaat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
2. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
3. Sistematis data, yaitu menampilkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk terarahnya permasalahan yang dibahas, maka penulis akan memaparkan sistematika penulisan yang akan membaginya atas empat bab. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing bab tersebut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan ini akan diuraikan mengenai latar belakang, yang mana hal tersebut menyangkut alasan atau faktor pendorong untuk dilakukan kajian yang lebih mendalam. Rumusan masalah memuat beberapa permasalahan yang akan diangkat dan dibahas mendetail dalam pembahasan. Adapun mengenai tujuan, memuat pernyataan singkat tentang apa yang hendak dicapai dalam penulisan ini. Manfaat penulisan, merupakan uraian mengenai kegunaan suatu penulisan hukum. Metode penulisan dan sistematika penulisan untuk mempermudah dalam membuat penulisan hukum ini.

### **BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Dalam bab ini penulis akan memaparkan landasan teori atau kajian teori berkaitan dengan permasalahan yang akan ditulis oleh penulis mengenai perpajakan.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan menguraikan apa yang menjadi pembahasan sebagai objek kajian penulisan ini. Dalam pembahasan akan dikaitkan dengan kajian – kajian teori serta landasan yuridis yang mengaturnya sehingga semakin kuat dan lengkap.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisa hukum ini yang berisikan suatu kesimpulan dan saran.

